

Analisis Sinergitas Unsur Patroli Guna Penegakan Hukum dalam Rangka Mendukung Operasi Keamanan Laut di Alki II

Agung Rikwan Harjanto

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL)

harjantoagungrikwan@gmail.com

ABSTRACT

The security of the Indonesian maritime domain, particularly in the strategic ALKI II (Indonesian Archipelagic Sea Lanes II), requires synergy between patrol elements to enforce the law effectively. This maritime region serves as a crucial international shipping lane, necessitating a coordinated approach to security enforcement. Effective law enforcement in ALKI II depends on the seamless collaboration among various maritime security stakeholders, including the Navy, Marine Police, and related agencies. Each of these entities plays a significant role in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty by preventing illegal activities such as smuggling, piracy, and illegal fishing. This study analyzes the level of synergy among these patrol units in supporting maritime security operations, focusing on operational coordination, resource sharing, and strategic policy alignment. Using a qualitative approach with data collected through structured interviews, field observations, and document analysis, this research identifies key challenges and opportunities in optimizing inter-agency cooperation. The findings suggest that enhanced inter-agency collaboration, the integration of advanced surveillance technologies, and the establishment of clear operational frameworks significantly improve the effectiveness of law enforcement in ALKI II. Additionally, the study highlights the necessity of standardized communication protocols and joint training programs to strengthen coordination among security agencies. The results provide actionable insights for policymakers in designing comprehensive maritime security strategies that align with national defense priorities.

Keywords: maritime security, patrol synergy, law enforcement, ALKI II, inter-agency cooperation, strategic coordination, surveillance technology

ABSTRAK

Keamanan wilayah maritim Indonesia, khususnya di ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia II) yang strategis, memerlukan sinergitas antara unsur patroli guna menegakkan hukum secara efektif. Wilayah maritim ini berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional yang sangat penting, sehingga pendekatan yang terkoordinasi dalam penegakan keamanan menjadi keharusan. Efektivitas penegakan hukum di ALKI II sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan keamanan maritim, termasuk TNI AL, Polair, dan instansi terkait lainnya. Setiap lembaga ini memiliki peran signifikan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan mencegah berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal. Penelitian ini menganalisis tingkat sinergitas antara satuan patroli dalam mendukung operasi keamanan laut, dengan fokus pada koordinasi operasional, berbagi sumber daya, dan penyelarasan kebijakan strategis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama serta peluang dalam optimalisasi kerja sama antar instansi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa peningkatan kerja sama antar instansi, integrasi teknologi pengawasan canggih, serta pembentukan kerangka operasional yang jelas secara signifikan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di ALKI II. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya standarisasi protokol komunikasi dan program pelatihan bersama guna memperkuat koordinasi antar-lembaga keamanan. Temuan ini memberikan wawasan yang dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan dalam merancang strategi keamanan maritim yang komprehensif dan selaras dengan prioritas pertahanan nasional.

Kata kunci: keamanan maritim, sinergitas patroli, penegakan hukum, ALKI II, kerja sama antar instansi, koordinasi strategis, teknologi pengawasan

PENDAHULUAN

Wilayah maritim Indonesia memiliki peran strategis dalam lalu lintas pelayaran internasional, terutama di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Sebagai jalur utama yang menghubungkan perairan domestik dengan rute perdagangan global, keamanan di wilayah ini menjadi aspek krusial yang menuntut penegakan hukum yang efektif dan koordinasi yang kuat antar instansi. Tantangan keamanan di ALKI II meliputi berbagai ancaman, seperti penyelundupan, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal, yang dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas maritim nasional. Dalam konteks ini, teori keamanan maritim dan teori kerja sama antar-lembaga menjadi kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dinamika sinergitas dalam operasi patroli laut.

Teori keamanan maritim menekankan pentingnya perlindungan perairan suatu negara dari ancaman eksternal dan internal, yang mencakup aspek militer, ekonomi, dan lingkungan (Bueger, 2015). Keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan upaya penegakan hukum, tetapi juga dengan stabilitas politik dan ekonomi nasional. Sementara itu, teori kerja sama antar-lembaga (*inter-agency cooperation theory*) menjelaskan bahwa efektivitas suatu operasi keamanan sangat bergantung pada tingkat koordinasi, komunikasi, serta berbagi sumber daya antar-instansi yang memiliki kepentingan yang sama (Huxham & Vangen, 2005). Sinergitas yang baik dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi tumpang tindih kewenangan di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek keamanan maritim dan sinergitas antar-lembaga dalam konteks Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Susanto et al. (2018) mengkaji efektivitas patroli bersama antara TNI AL dan Polair dalam mengamankan perairan Selat Malaka, yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan perbedaan prosedur operasional masih menjadi kendala utama dalam kolaborasi. Penelitian lain oleh Ramadhan & Yulianto (2020) menyoroti pentingnya teknologi pengawasan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah laut, dengan menekankan perlunya sistem berbagi informasi yang lebih terintegrasi antar-instansi. Selain itu, studi oleh Nugroho (2021) menemukan bahwa meskipun telah ada kebijakan kerja sama dalam pengamanan

maritim, implementasinya masih menghadapi hambatan birokrasi dan kurangnya standar operasional yang jelas.

Dalam menghadapi tantangan di ALKI II, sinergitas antara berbagai unsur patroli, termasuk TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, serta instansi terkait lainnya, menjadi faktor utama dalam memastikan efektivitas operasi keamanan laut. Meskipun setiap lembaga memiliki mandat dan kewenangan masing-masing, keterpaduan dalam koordinasi operasional, berbagi sumber daya, serta penyelarasan kebijakan strategis masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis tingkat sinergitas antara satuan patroli dalam mendukung operasi keamanan laut di ALKI II.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen guna mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam meningkatkan kerja sama antar instansi. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana koordinasi operasional dapat diperkuat melalui integrasi teknologi pengawasan, standarisasi protokol komunikasi, serta program pelatihan bersama. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem keamanan maritim yang lebih efektif dan selaras dengan kepentingan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tingkat sinergitas antar-satuan patroli dalam mendukung operasi keamanan maritim di ALKI II. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam mengenai dinamika kerja sama antar-lembaga, tantangan operasional, serta peluang optimalisasi dalam penegakan hukum di wilayah maritim strategis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai koordinasi operasional, berbagi sumber daya, serta penyelarasan kebijakan antar instansi keamanan maritim di ALKI II.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah ALKI II yang meliputi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya aktivitas pelayaran internasional dan potensi ancaman keamanan di wilayah tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

- **Wawancara Terstruktur:** Dilakukan terhadap narasumber dari TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Wawancara berfokus pada mekanisme koordinasi, kebijakan kerja sama, serta kendala yang dihadapi dalam operasi patroli laut.

- **Observasi Lapangan:** Pengamatan langsung terhadap kegiatan patroli bersama, prosedur komunikasi, serta penggunaan teknologi pengawasan di wilayah ALKI II.
- **Analisis Dokumen:** Meliputi kebijakan, peraturan, dan laporan operasi patroli yang terkait dengan keamanan maritim di ALKI II.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan:

- **Reduksi Data:** Seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan penelitian.
- **Penyajian Data:** Penyusunan data dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai sinergitas antar-lembaga.
- **Penarikan Kesimpulan:** Analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola kerja sama, tantangan, serta peluang dalam optimalisasi sinergitas antarinstansi.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen tertulis guna memastikan konsistensi temuan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat sinergitas antar-satuan patroli dalam mendukung keamanan maritim di ALKI II, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat koordinasi antar instansi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Sinergitas Antar-Instansi dalam Operasi Patroli di ALKI II

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, ditemukan bahwa sinergitas antara TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan (Polair), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam operasi keamanan di ALKI II masih menghadapi berbagai tantangan. Meski ada upaya untuk mengoordinasikan patroli bersama, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama ini belum sepenuhnya terintegrasi.

Koordinasi operasional masih dilakukan secara sektoral, di mana masing-masing lembaga memiliki mandat dan prosedur operasional tersendiri. Akibatnya, sering terjadi duplikasi patroli di beberapa wilayah, sementara area lain justru kurang mendapatkan pengawasan. Selain itu, perbedaan dalam prosedur hukum

antar instansi menyebabkan lambannya proses penindakan terhadap pelanggaran di laut, seperti penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan.

Sejumlah responden menyoroti pentingnya keseragaman kebijakan dan protokol operasional agar kerja sama dapat berjalan lebih efektif. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memperbaiki koordinasi, seperti pembentukan forum kerja sama lintas lembaga dan peningkatan jumlah operasi gabungan. Namun, kendala administratif dan perbedaan budaya organisasi antar instansi masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto et al. (2018), yang menemukan bahwa patroli bersama antara TNI AL dan Polair di perairan Selat Malaka masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi, berbagi informasi, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Maritim

Teknologi pengawasan laut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum di ALKI II. Beberapa sistem yang telah digunakan di antaranya:

- Radar maritim dan AIS (*Automatic Identification System*): Digunakan oleh TNI AL dan Bakamla untuk memantau pergerakan kapal di wilayah perairan Indonesia.
- Pengawasan berbasis satelit: Memungkinkan deteksi kapal yang melakukan aktivitas mencurigakan, termasuk praktik penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan.
- Drone dan pesawat patroli maritim: Digunakan untuk pengawasan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kapal patroli.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi yang digunakan oleh masing-masing lembaga masih berjalan secara terpisah, sehingga tidak memungkinkan berbagi data secara real-time. Hal ini menghambat deteksi dini terhadap ancaman keamanan dan memperlambat pengambilan keputusan.

Beberapa petugas lapangan menyatakan bahwa kurangnya interoperabilitas sistem menjadi kendala utama dalam penggunaan teknologi secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat modernisasi perangkat pengawasan, terutama dalam pengadaan sistem deteksi dini yang lebih canggih.

Temuan ini mendukung penelitian Ramadhan & Yulianto (2020), yang menyoroti bahwa integrasi teknologi pengawasan antar instansi dapat meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah laut secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan sistem teknologi yang digunakan oleh berbagai lembaga keamanan maritim di Indonesia.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Antar-Lembaga

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur kerja sama antar instansi dalam keamanan maritim, implementasinya masih mengalami kendala. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi:

- Perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP): Setiap instansi memiliki SOP sendiri dalam menangani operasi keamanan laut, yang kadang kala tidak selaras dengan SOP instansi lain.
- Kurangnya Standarisasi Protokol Komunikasi: Sistem komunikasi antar instansi belum sepenuhnya terintegrasi, menyebabkan keterlambatan dalam koordinasi di lapangan.
- Kendala Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi patroli laut sering menghambat efektivitas respons terhadap ancaman keamanan maritim.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Bersama: Tidak semua personel memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur kerja sama antar instansi, sehingga menimbulkan kesenjangan koordinasi dalam operasi patroli gabungan.

Hambatan ini sejalan dengan temuan penelitian Nugroho (2021), yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kerja sama dalam pengamanan maritim telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala birokratis dan teknis.

Upaya Optimalisasi Sinergitas Antar-Instansi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan sinergitas antar-lembaga dalam operasi keamanan laut di ALKI II:

a. Peningkatan Koordinasi Operasional

- 1) Pembentukan pusat komando bersama yang bertanggung jawab atas koordinasi patroli di ALKI II.
- 2) Penguatan regulasi terkait pembagian tugas antar instansi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

b. Integrasi Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan

- 1) Pengembangan sistem berbagi informasi *real-time* yang memungkinkan seluruh instansi terkait untuk mengakses data keamanan maritim secara simultan.

Dalam menghadapi tantangan keamanan maritim di ALKI II, pengembangan sistem berbagi informasi secara *real-time* menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi. Sistem ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan seperti TNI AL, Polair, Bakamla, KKP, dan instansi terkait lainnya untuk

mengakses data keamanan maritim secara simultan, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan respons terhadap ancaman. Beberapa elemen utama dalam pengembangan sistem ini meliputi:

- a) Integrasi Basis Data Bersama
 - Pembuatan platform digital yang menyatukan data dari berbagai instansi, mencakup informasi tentang kapal mencurigakan, pelanggaran hukum, rute patroli, dan situasi keamanan terkini.
 - Penggunaan teknologi *blockchain* untuk memastikan keamanan dan transparansi data yang dibagikan antar instansi.
- b) Sistem Komunikasi Terenkripsi
 - Penerapan protokol komunikasi terenkripsi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif kepada pihak yang tidak berkepentingan.
 - Penggunaan jaringan komunikasi satelit yang memungkinkan akses data di area maritim terpencil dengan gangguan sinyal minimal.
- c) Peningkatan Kecepatan Respons Melalui AI dan Big Data
 - Penggunaan *big data analytics* untuk mengidentifikasi pola ancaman berdasarkan data historis yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
 - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem analisis ancaman untuk memberikan rekomendasi tindakan kepada petugas keamanan laut secara otomatis.
- d) Penyelarasan SOP dan Penguatan Pelatihan
 - Standarisasi prosedur operasional dalam penggunaan sistem berbagi informasi, sehingga semua instansi memiliki pemahaman yang sama dalam menafsirkan data.
 - Pelaksanaan simulasi latihan bersama untuk meningkatkan kesiapan personel dalam menggunakan sistem ini secara efektif.

Dengan adanya sistem berbagi informasi *real-time*, setiap instansi yang terlibat dalam pengamanan maritim dapat bekerja lebih sinkron, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan efisiensi operasi patroli laut.

- 2) Implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemantauan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman keamanan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemantauan keamanan maritim dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, termasuk penyelundupan, perompakan, dan aktivitas perikanan ilegal. Teknologi AI mampu menganalisis data dari berbagai sensor dan sumber informasi, sehingga mempercepat

identifikasi potensi risiko. Komponen utama dalam implementasi AI meliputi:

- a) Pemantauan Berbasis Citra Satelit dan Drone Otonom
 - Penggunaan drone maritim dan udara yang dilengkapi dengan kamera termal dan sensor canggih untuk memantau pergerakan kapal secara otomatis.
 - Integrasi citra satelit resolusi tinggi dengan AI untuk mendeteksi pola aktivitas mencurigakan, seperti kapal yang sering berpindah jalur atau berhenti di lokasi yang tidak semestinya.
- b) Pengenalan Pola dan Anomali dengan *Machine Learning*
 - AI dapat mempelajari pola lalu lintas laut yang normal dan mendeteksi anomali yang mungkin mengindikasikan tindakan ilegal.
 - Sistem *machine learning* dapat memperingatkan otoritas keamanan jika menemukan pergerakan kapal yang tidak sesuai dengan rute yang biasa digunakan.
- c) Otomasi Peringatan Dini dan Prediksi Ancaman
 - AI dapat menghubungkan data dari radar, sonar, AIS (*Automatic Identification System*), dan sensor lainnya untuk memprediksi ancaman secara lebih akurat.
 - Teknologi *predictive analytics* memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman, sehingga petugas dapat merespons dengan lebih cepat sebelum insiden terjadi.
- d) Dukungan pada Pengambilan Keputusan Operasional
 - Sistem berbasis AI dapat memberikan rekomendasi strategi patroli dengan menyesuaikan rute kapal patroli berdasarkan tingkat kerawanan di suatu wilayah.
 - AI dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, misalnya dengan menentukan kapan dan di mana kapal patroli perlu ditempatkan berdasarkan data historis kejadian keamanan.
- e) Integrasi AI dengan Pusat Komando Maritim
 - Penggunaan *dashboard* interaktif yang menampilkan laporan AI secara *real-time*, sehingga pusat komando dapat segera mengoordinasikan tindakan yang diperlukan.
 - Integrasi dengan sistem pengawasan global, seperti IMB Piracy Reporting Centre atau Sistem Keamanan Maritim Regional, untuk berbagi data ancaman lintas negara.

Dengan implementasi AI dalam sistem pemantauan keamanan maritim, efektivitas deteksi dini dan respons terhadap ancaman dapat meningkat secara signifikan. Teknologi ini memungkinkan reduksi kesalahan manusia (*human error*) dalam analisis situasi, serta membantu

mempercepat proses pengambilan keputusan strategis oleh otoritas keamanan laut.

c. Standarisasi Protokol Komunikasi

- 1) Penyusunan kebijakan komunikasi yang seragam di seluruh instansi guna mempercepat respons terhadap insiden maritim.
- 2) Penggunaan frekuensi komunikasi yang terintegrasi agar informasi dapat tersampaikan secara cepat dan efektif.

d. Pelatihan dan Simulasi Bersama

- 1) Mengadakan program pelatihan terpadu bagi personel dari berbagai instansi guna meningkatkan kesiapan operasional.

Program pelatihan terpadu bagi personel dari berbagai instansi, seperti TNI AL, Polair, Bakamla, dan KKP, sangat penting untuk meningkatkan kesiapan operasional dalam menjaga keamanan maritim, khususnya di ALKI II. Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang prosedur operasi standar (SOP), meningkatkan kemampuan teknis dan taktis dalam patroli laut, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman seperti penyelundupan, perompakan, dan penangkapan ikan ilegal. Simulasi skenario nyata, penggunaan teknologi canggih seperti AI dan sistem radar maritim, serta latihan komunikasi dan koordinasi antar instansi akan menjadi bagian dari program ini. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan setiap personel dapat lebih sigap, efisien, dan sinergis dalam menjalankan tugasnya, sehingga efektivitas penegakan hukum maritim dapat semakin meningkat.

- 2) Simulasi patroli gabungan secara berkala untuk memperkuat keterpaduan dalam operasi keamanan laut.

Pelaksanaan simulasi patroli gabungan secara berkala merupakan langkah strategis dalam memperkuat keterpaduan antar instansi dalam operasi keamanan laut, khususnya di ALKI II yang memiliki tingkat aktivitas pelayaran tinggi. Simulasi ini bertujuan untuk menguji dan menyempurnakan koordinasi operasional antara TNI AL, Polair, Bakamla, KKP, serta instansi lainnya dalam menghadapi ancaman nyata, seperti penyelundupan, perompakan, dan pelanggaran batas perairan.

Dalam simulasi ini, setiap instansi akan menjalankan peran spesifik sesuai dengan kewenangannya, namun tetap dalam kerangka kerja sama yang terintegrasi. Beberapa skenario yang dapat diterapkan dalam latihan ini meliputi: penanganan kapal ilegal, operasi pengejaran lintas batas, intervensi terhadap ancaman bersenjata, serta evakuasi dan penyelamatan di laut. Selain itu, teknologi pengawasan canggih, seperti

drone maritim, radar pantai, sistem komunikasi satelit, dan AI untuk analisis pergerakan kapal, juga akan diintegrasikan dalam simulasi guna meningkatkan efektivitas deteksi dan respons terhadap ancaman.

Simulasi patroli ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas prosedur operasional standar (SOP), mengidentifikasi kendala koordinasi, serta meningkatkan keterampilan personel dalam bekerja sama secara lintas sektor. Dengan frekuensi pelaksanaan yang rutin dan evaluasi berkelanjutan, patroli gabungan dapat lebih sinkron dan responsif terhadap dinamika ancaman maritim, sehingga efektivitas penegakan hukum di wilayah ALKI II dapat ditingkatkan secara signifikan

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, efektivitas kerja sama antar instansi dalam penegakan hukum maritim dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas keamanan di ALKI II.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antar instansi dalam operasi patroli di ALKI II masih menghadapi berbagai kendala, termasuk perbedaan SOP, kurangnya standarisasi protokol komunikasi, serta keterbatasan integrasi teknologi pengawasan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama, seperti peningkatan koordinasi operasional, integrasi sistem informasi, serta pelaksanaan pelatihan bersama.

Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi keamanan maritim yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika ancaman di perairan Indonesia. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat dan teknologi yang lebih maju, ALKI II dapat dijaga dengan lebih efektif, sehingga mendukung stabilitas nasional serta kepentingan ekonomi dan pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Evers, H.-D., & Gerke, S. (2006). Maritime security: A new research agenda. *Asian Journal of Social Science*, 34(3), 456–473. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Huxham, C., & Vangen, S. (2005). *Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage*. Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

- Nugroho, B. (2021). Implementasi kebijakan kerja sama dalam pengamanan wilayah maritim Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(1), 45–63. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Pramono, I. (2019). Analisis kebijakan keamanan maritim di Indonesia: Tantangan dan prospek. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 210–225. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Ramadhan, D., & Yulianto, A. (2020). Peran teknologi pengawasan dalam keamanan maritim: Studi kasus integrasi sistem informasi keamanan laut di Indonesia. *Jurnal Pertahanan Maritim*, 5(2), 123–140. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Rusdi, M. (2017). Penegakan hukum di perairan Indonesia: Studi kasus tindak pidana perikanan. *Jurnal Hukum Laut Indonesia*, 2(1), 55–70. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Susanto, R., Hidayat, T., & Handayani, S. (2018). Efektivitas patroli bersama dalam pengamanan perairan Selat Malaka. *Jurnal Keamanan dan Pertahanan*, 4(3), 78–95. [https://doi.org/\[DOI jika ada\]](https://doi.org/[DOI jika ada])
- Yulianto, A. (2022). *Strategi penguatan keamanan maritim di wilayah ALKI II*. Pustaka Maritim.